

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004)
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Candra Perbawati, *Negara Hukum Kesejahteraan*, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013)
- Dwi P. Nugraha, Febriantoro Suardy, dan Jonker Sihombing, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)
- Gunanegara, *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah* (Jakarta: Tatanusa, 2016)
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988)
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hal.vii
- M. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Mudakir Iskandar Syah, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Permata Aksara, 2015)
- Muhawid, *Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan*

*Umum*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, Jakarta, 2006)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial* (Semarang: Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 2010)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986)

## **JURNAL**

Ali Bastanta dan Tundjung Harning Sitabuana, “Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *UNES Law Review*, Vol.6, No.3 29 Maret 2024. 8463-8471. DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1753

Denico Doly, “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat”, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 8, No. 2 30 November 2017. 195-214. DOI: 10.22212/jnh.v8i2.1053

Dhaniswara K. Harjono, “Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1 29 Januari 2023. 14-24. DOI: 10.58344/jhi.v1i2.7

Maqdir Ismail dan Akhmad Ikraam, “Peranan Hukum dalam Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. 2, No. 2 2 Juli 2017. 17-22. DOI: 10.36722/jmih.v2i2.743

Muhammad Yusrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, *De Lege Lata*, Vol.2, No.1 Juni 2017. 113-138. DOI: 10.30596/dll.v2i1.1143

Muhammad Jibril, Avrel Mulia Pratama, dan Jinan Raidangi, “Konsep Penggabungan antara NJOP dan Nilai Pasar Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 1 5 Mei 2020. 56-65. DOI: 10.31292/jb.v6i1.424

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Harizul Akbar Nazwar, praktisi Penilai Pertanahan, KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan, Pejaten, Tanggal 11 November 2024, Pukul 14.00 wib.

Hasil wawancara dengan Putra Hutomo, dosen pascasarjana magister kenotariatan, *Zoom Meeting*, Tanggal 18 November 2024, Pukul 10.30 wib.